CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Peran politik Nasional dalam Strategi Nasional dan Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia

Dani Fadem Aljama[1], Neva Aulia Sabrina[2], Nabilah Ayu Puspita[3]
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
E-mail : danifaden6@gmail.com [1], nevasabira558@gmail.com[2],
nabilahayupuspita@gmail.com[3]

Abstrak

Politik nasional merupakan unsur fundamental perumusan dan pelaksanaan strategi nasional suatu negara. Politik nasional berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan aktor-aktor politik, institusi negara, serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik nasional dalam perumusan strategi nasional serta proses pembentukan kebijakan politik di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen. Politik nasional berperan penting dalam menentukan prioritas kebijakan, menjaga stabilitas politik, serta mengoordinasikan kepentingan nasional di tengah dinamika demokrasi dan globalisasi. politik nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan elit, lemahnya konsistensi kebijakan, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem politik nasional yang efektif dan demokratis.
Kata kunci: politik nasional, strategi nasional, kebijakan public, demokrasi

Abstract

National politics is a fundamental element in the formulation and implementation of a country's national strategy. National politics functions as a decision-making mechanism involving political actors, state institutions, and society in order to achieve national goals as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to analyze the role of national politics in the formulation of national strategies and the process of political policy-making in Indonesia. The research method employed is a qualitative descriptive approach, using secondary data collected through literature review and document analysis. The findings indicate that national politics plays an important role in determining policy priorities, maintaining political stability, and coordinating national interests amid the dynamics of democracy and globalization. However, national politics still

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

faces various challenges, such as elite interest conflicts, weak policy consistency, and low levels of public political participation. Therefore, integration between government policies and public participation is key to creating an effective, democratic, and public-oriented national political system.
***Keywords**: national politics, national strategy, public policy, democracy*

PENDAHULUAN

Politik nasional adalah keseluruhan proses, kebijakan, dan aktivitas politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. politik nasional Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik nasional berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan strategi nasional, pembentukan kebijakan publik, serta pengelolaan kehidupan politik yang demokratis, stabil, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Sejalan dengan, Strategi nasional sebagai pedoman pembangunan membutuhkan dukungan politik yang kuat agar dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, politik nasional tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kebijakan politik. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana politik nasional dijalankan secara efektif di tengah dinamika demokrasi, pluralisme masyarakat, serta pengaruh global. (Subakdi & Roring, E. B. 2024)

Dalam pelaksanaannya, politik nasional dijalankan melalui sinergi antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA, sedangkan infrastruktur mencakup partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga kelompok kepentingan. Keduanya berperan dalam menentukan arah dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu, arah politik dan strategi nasional kini didasarkan pada visi misi Presiden serta dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan (Subakdi & Roring, E. B. 2024)

Studi ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan konsep politik nasional serta strategi nasional dalam konteks pemerintahan Indonesia, menganalisis keterkaitan keduanya dalam proses perumusan kebijakan publik, serta mengkaji bagaimana implementasi politik serta strategi nasional dijalankan.

METODE

Artikel menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku teks ilmu politik, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik yang relevan dengan politik nasional dan kebijakan publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran dan tantangan politik nasional dalam strategi nasional dan pembentukan kebijakan politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Nasional dan Strategi Nasional

Politik dipahami sebagai usaha yang ditujukan untuk kepentingan umum, sedangkan dalam arti policy politik merujuk pada kebijakan yang dipilih sebagai cara terbaik mencapai cita-cita masyarakat. Politik juga berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Pengambilan keputusan politik dilakukan melalui sarana umum atau Lembaga

formal negara, seperti pemerintah dan parlemen. Keputusan yang dihasilkan harus berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. (Subakdi & Roring, E. B. 2024)

Sementara itu, strategi merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Istilah strategia berasal dari bahasa Yunani yang berarti seni seorang panglima atau the art of the general. Merujuk Karl von Clausewitz, strategi yakni pengetahuan terkait cara menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sementaraitu perang merupakan kelanjutan dari politik. Namun, dalam konteks modern, istilah strategi tidak lagi terbatas pada ranah militer, melainkan juga diterapkan secara luas dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan.alam sistem politik Indonesia, stabilitas politik nasional menjadi faktor utama keberhasilan strategi nasional. Konsensus politik, kerja sama antar lembaga negara, serta dukungan masyarakat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan strategi nasional. (Afni, R. C. M. 2020)

Dalam penyelenggaraan negara, politik nasional dan strategi nasional merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Politik nasional berfungsi sebagai arah dan kebijakan umum negara dalam mencapai tujuan nasional, sedangkan strategi nasional menjadi langkah operasional untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Politik memberi arah, strategi menjalankan langkah nyata, sehingga keberhasilan implementasi negara bergantung pada sinergi keduanya. Politik dan strategi nasional berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, Wawasan Nusantara sebagai pedoman visi kebangsaan, serta Ketahanan Nasional sebagai dasar operasional. Jika politik diarahkan untuk kepentingan rakyat dan strategi disusun secara sistematis, keduanya menjadi kekuatan utama untuk mencapai cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945, yakni terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. (Afni, R. C. M. 2020)

Peran Politik Nasional dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Pelaksanaan politik dan strategi nasional merupakan tahap konkret dari penerapan kebijakan yang dirancang untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan kebijakan politik merupakan hasil dari proses politik nasional yang melibatkan perumusan, pembahasan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan. Politik nasional berfungsi sebagai arena negosiasi kepentingan antara berbagai actor politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Afni, R. C. M. 2020)

Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan kebijakan sering dipengaruhi oleh kepentingan elit politik dan kompromi jangka pendek. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang konsisten dan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik. Di sinilah strategi nasional berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mengatur langkah-langkah pembangunan, agar setiap kebijakan publik tetap berorientasi pada tujuan nasional dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Politik nasional memiliki peran strategis dalam menentukan arah strategi nasional dan pembentukan kebijakan politik di Indonesia. Politik nasional yang stabil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Keduanya didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional sebagai fondasi sistem pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada rakyat.Keberhasilan pelaksanaan politik dan strategi nasional bergantung pada keselarasan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemampuan bangsa menghadapi tantangan global.Dengan demikian, politik nasional dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan nasional.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Afni, R. C. M. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i

Subakdi, & Roring, E. B. (2024). Implementasi Politik Strategi Nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1).

Pasaribu, R. B. F. (2000). Pendidikan Pancasila: Bab 9 Politik dan Strategi Nasional. Pustaka Setia, Bandung.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.